

Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Terapeutik bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Oleh : Henidar Noor Mutia

Abstrak

Kesehatan merupakan hak setiap manusia termasuk Narapidana. Kenyataannya hak-hak narapidana dalam pelayanan kesehatan masih terabaikan. Penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi, yaitu berjumlah 1.929 orang. Tingkat kepadatan penghuni dalam suatu lembaga pemasyarakatan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap pasien yang berstatus narapidana.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis–Empiris dengan melakukan pendekatan terhadap fakta yang ada di lapangan melalui wawancara kepada responden serta dengan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode sampling *Purposive Sampling* untuk memilih sekelompok subjek penelitian berdasarkan ciri-ciri yang berkaitan dengan ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **pertama**, pelayanan kesehatan di dalam Balai Pengobatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta secara umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, namun perbandingan jumlah tenaga kesehatan yang ada dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta tidak seimbang. Pelaksanaan perjanjian terapeutik oleh dokter atau dokter gigi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, secara umum sesuai dengan Pasal 1320 KUHAPerdata. **Kedua**, perlindungan hukum bagi narapidana dalam perjanjian terapeutik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Kesehatan, Narapidana, Terapeutik

The Legal Protection of Therapeutic Agreement for Sentenced Persons in The Class IIA Yogyakarta's Penitentiary Facility

Abstrak

Health is a right that every human have, including prisoners. In reality, prisoners right for health service is neglected. Prison and penitentiary in Daerah Istimewa Yogyakarta Province, has a lot numbers of prison, for about 1929 person. This number will affect directly to the quality of health service for prisoners and penitentiary provided for them. This kind of problem in penitentiary also closely related with the prisoners legal protection.

This legal research used empirical juridical methods that approach facts in the fields. The data for this research was obtained by in-depth interview with informant and also reviewing regulation related to that. Author used non probability sampling and purposive sampling method for this research to choose a group of subject according to characteristics that related with characteristic which author known. The data analyzed with qualitative descriptive analysis.

The result of this research concluded, that health service that Polyclinics Penitentiary, Class II A, Yogyakarta, generally appropriate with government regulations No. 32 Tahun 1999, however the ratio of medical worker and prisoner in Penitentiary Class IIA is not balance. The implementation of therapeutic agreement between patiens and doctor or dentist in Penitentiary Class II A Yogyakarta, generally in accordance with article 1320 Civil Code. This reaserch also concluded that legal protection for prisoners within therapeutic agreement in Penitentiary Class II A, Yogyakarta is not appropriate with regulations.

Keyword : Health, Prisoner, Therapeutic